

POLISI, MAHIR DAN TUNDUK HUKUM *

Oleh : Harry Roesli**

Abstract

Harry Roesli asserts that Indonesian needs humane police officers. They should be the ones who understand the people and their aspirations, and act non-militarily. For that reason, he implicitly suggests that police officers should have knowledge on humanities.

Si Bujel adalah seorang penyair. Dia mencipta sebuah puisi seperti berikut :

“Sekelompok orang
termenung di malam purnama
di mulut sebuah gang”(dst)

Si Bujel berniat untuk mengadakan pembacaan puisi dengan materi salah satunya puisi di atas tadi. Dia datang ke kantor polisi setempat untuk mendapatkan izin pembacaan puisi. Dia menemui seorang perwira menengah, bernama Mayor Pambudi Pamungkas. Terjadilah percakapan seperti ini.

“Mohon izin pembacaan puisi ini, pak !” tukas si Bujel. Si Mayor tercenung sebentar, dan dia mulai membaca puisi si Bujel : “*Sekelompok orang*” orang golongan mana ini?” Tanya si Mayor.

“Itu puisi pak” Bujel coba membela.

Mayor menyergah : “*Termenung di malam purnama ...* malam purnama kapan ini, harus jelas!” (Bujel tercenung bengong)

Mayor terus bicara “*Di mulut sebuah gang* gang mana ini !”

“Coba ya, kalau buat puisi seperti ini, yang lebih jelas keterangannya,

* Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Membangun POLRI dengan Karakter Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang 8 Juli 1999.

** Doktor Seni Musik, Dosen Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bandung.

jangan setengah-setengah begini, jadi kalau ada apa-apa saya mudah mengamankan.”

Kalau kita simak, pendekatan polisi saat ini terhadap apapun disamaratakan melalui pendekatan keamanan. Ini menyiratkan dan menyuratkan bahwa “tubuh” Polisi di sini terkooptasi “tubuh” militer. *Dengan tubuhnya yang militer, Polisi kita punya “tangan” yang beridom hukum. Di sinilah “kelebihan” polisi Indonesia. Polisi atau Polri boleh menyita, menggeledah, menahan orang, memeriksa, tapi sekaligus juga halal membunuh siapa saja.*

Padahal membunuh itu adalah doktrin militer *“To kill, or to be killed.”* Sedang doktrin polisi lebih tepatnya *“to protect and to serve”*. Dengan tubuh militer, dan tangan hukum, dua doktrin di atas jadi salah kaprah, dan secara tidak langsung menjadi doktrin Polri saat ini, yaitu *“to kill or to be kill, and to protect and I serve the killer”*.... sinis memang, tapi kesan itulah yang menempel di benak saya. Maaf.

Ini semua dikarenakan kooptasi militer terlalu kuat dalam Polri. Padahal sesungguhnya, polisi bisa dikatakan sebagai tangan-tangan kuat dari hukum. Kita ketahui bahwa hukum itu berisi janji-janji akan keadilan, dan janji-janji itu akan menjadi kenyataan melalui campur tangan polisi. Artinya tanpa polisi, hukum hanya akan merupakan huruf mati belaka, atau dengan polisi yang bertubuh militer, hukum akan sekedar menjadi kerancuan budaya. Maksudnya, pendekatan hukum bagi Polri hanya didekati *an sich* sebagai kasus keamanan, bukan kasus budaya. Makanya, bisa dibenarkan cerita teman saya, “Kalau kamu kehilangan kambing, lalu lapor polisi, bisa-bisa kamu malahan kehilangan kerbau.”

Inilah yang disebut kebudayaan militer sebagai alat penguasa untuk sektor keamanan pada saat ini. Polri pun begitu, bukannya sebagai manusia profesional dan mandiri yang tegak berdiri sebagai pelayan dan pengayom secara struktural maupun kultural.

Kesan militer yang bisa dikatakan begitu lekat pada Polri, *inherent* dengan tiga dasawarsa bersatunya lembaga ini dengan ABRI. Kita tahu persis, Polri dididik dan dibentuk dengan gaya militer, mulai dan Akpol yang menyatu dengan Akabri, hingga ketika akan mencetak pimpinan Polri lewat Sesko ABRI. Sehingga disadari atau tidak, pendekatan

keamanan sebagai ciri tindakan militer telah menjauhkan Polri dengan masyarakat secara nalar dan budaya.

Citra polisi yang terbentuk di masyarakat adalah sebagai sosok para militer yang tegar dan siap menghancurkan musuh, bukannya bagian dari "crime justice system". Menurut kita, polisi memang merupakan alat negara yang dilengkapi senjata. Namun senjata di tangan polisi amat berbeda fungsinya dengan senjata di tangan militer. Senjata yang dimiliki polisi bukan untuk kekerasan, melainkan upaya paksa dan preventif untuk menciptakan ketertiban yang bermuara pada penciptaan tatanan yang adil di tengah masyarakat yang didasari oleh kesadaran hukum dan budaya dalam nalar melindungi.

Polisi sebagai abdi hukum seharusnya disosialisasikan dan diaplikasikan secara langsung oleh segenap aparat kepolisian. Bukan sekedar berteriak. Polri sekarang adalah Polri baru, dengan tatanan konsep yang baru, dengan idiomatik yang baru, bahkan dengan seragam yang baru. Inilah Polri baru. Retorika-retorika seperti ini malah membuat saya curiga, kalau ada Polri yang baru ... baru ... baru, jangan-jangan sebentar lagi ada di iklan TV, POLRI Perjuangan !!!

Jadi yang baru jangan hanya sekedar seragam, tapi doktrin, persepsi, wawasan, dan budaya yang bermateri pendidikan hukum, bukan keamanan. Dengan demikian, Insha Allah, citra polisi akan lebih tidak sekedar menjadi maju kena mundur kena, atau kesan basa-basi memisahkan diri bisa cepat terhapus, dan dengan kekuatan sendiri, mendorong percepatan perubahan Polri. Saat ini Polri itu terasa dilepas kepalanya, tapi tetap dipegang ekornya oleh militer.

Perubahan ini bisa saja secara gradual tapi pasti. Hanya perlu diingat bahwa Polri saat ini sudah di titik yang tidak bisa lagi kembali. Polisi mandiri adalah pilihan satu-satunya, dan masyarakat menunggu itu. Kendatipun DR. Andreas Kapardis mengatakan bahwa tidak semua subbudaya polisi sama di semua *Police force* di masing-masing negara, mereka memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan ini terletak pada bentuk dan cara pertanggungjawabannya, pendidikannya, seleksi dan pelatihannya, cara penggunaan teknologinya, bahkan juga tuntutan masyarakatnya terhadap posisi polisi. Jelas hal ini tidak sama di semua negara.

Polisi mandiri, itulah *local content* yang menjadi tuntutan masyarakat di Indonesia. Polisi pengayom, itulah budaya polisi yang diharapkan

masyarakat. Polisi profesional, begitu keinginan dari masyarakat madani. Walaupun memang harus diakui subkebudayaan polisi kita cukup khas. Prof DR. A. Muis SH, merujuk subkultur ini pada RUU Hukum Pidana, yang ditindaklanjuti oleh KUH-Pidana lama. Rujukan ini membuat polisi lebih merasa sebagai alat penegak kekuasaan daripada sebagai alat penegak hukum (cerita si Dewi). Juga kooptasi kebudayaan militer seperti diutarakan tadi, sudah puluhan tahun lengket pada polisi. Sehingga, terbentuklah kesan *army looking police officer*”, lebih cenderung sebagai alat perang, bukan sebagai alat supremasi penegakan hukum.

DR. Dutton pernah menyatakan: *“The Role of police officers has become much broader and a lot more demanding.”* Tak ada profesi yang sama dengan polisi. Mengapa? Polisi diharuskan punya kepandaian dan keahlian yang beraneka ragam. Tak peduli sumber daya dan peralatannya sering terbatas, polisi tetap dituntut tidak hanya mahir mengatasi keamanan atau sekedar kriminalitas, atau ketertiban lalu-lintas, namun juga harus mahir mengatasi dan menenangkan *“an angry crowd”* sekaligus mengetuk pintu rumah seorang TO, atau tersangka, dengan sopan dan santun.

Begitu berat tuntutan profesi seorang polisi. Tapi tidak ada jalan lagi bagi polisi, selain berjalan secara cepat maupun gradual ke arah wajah, tubuh, tangan, kepala yang berfilosofi dan berkebudayaan polisi mandiri.

Kemandirian ini tentu tidak akan didapatkan secara mudah, apalagi cuma-cuma. Yang dihadapi Polri saat ini bukan semata berkutat pada soal gaya militer ataupun posisi struktur Polri di pemerintahan, namun juga berbagai bentuk persoalan lain yang demikian banyak, dan menuntut untuk segera dibenahi. Namun yang jelas, masyarakat menuntut polisi yang mandiri, profesional, sigap dan tanggap dalam mengayomi, melindungi, melayani masyarakat, dengan pendekatan kebudayaan hukum (bukannya kekerasan), dan bebas kooptasi.

Memang secara jujur saya merasakan usaha Polri untuk mereformasi dirinya sendiri. Tapi usaha ini harus lebih menyentuh pada tuntutan masyarakat secara fisik, nyata, juga secara budaya. Semoga usaha kontemplasi Polri atas apa yang pernah dilakukan pada masa lalu, bisa membuahkan hal-hal yang positif dan kebaikan-kebaikan di masa-masa mendatang.

Dengan segala kerendahan hati, sudah terbentuk oleh progresi budaya sebuah tuntutan ideal. Bahwa ideal sekali bila Polri itu mahir hukum, tapi sekaligus juga tunduk pada hukum itu sendiri. Karena hukum itu berisi janji-janji akan keadilan, dan janji-janji itu akan menjadi kenyataan melalui campur tangan polisi yang mahir dan tunduk hukum.

